



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



**ABDUL RAHMAN HARIS
NIM 1911150013**

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**ABDUL RAHMAN HARIS
NIM 1911150013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026 /1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp: (0736) 51276-51161-53879 Faxm: (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **ABDUL RAHMAN HARIS**

NIM 1911150013 dengan judul **"Analisis Peran Dan Fungsi Dewan**

Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perspektif Siyash Dsturiyah". Program Studi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu,

skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

(UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2026 M

1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fauzan, S. Ag, MH

Hidayat Darussalam, M. E. Sy

NIP.197707252002121003

NIP.198611072020121008



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh **ABDUL RAHMAN HARIS NIM. 1911150013** dengan judul **"Analisis Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah"**. Program Studi Hukum Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim sidang **Munaqasyah** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari, **Senin**

Tanggal : **22 Desember 2025/1447 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara..

Bengkulu, Februari 2026 M

1447 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag. MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Fauzan, S. Ag. MH

Hidayat Darussalam, M. E. Sy

NIP. 197707252002121003

NIP. 198611072020121008

Penguji I

Penguji II

Dr. Wery Gusmansyah, M. H

Ifansyah Putra, M. Sos

NIP. 198202122011011009

NIP. 199303312019031005

ABSTRAK

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH NAMA : ABDUL RAHMAN HARIS NIM 1911150013

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memiliki keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat. Demokrasi adalah [bentuk pemerintahan](#) di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta-baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan [hukum](#).

Demokrasi mencakup kondisi [sosial](#), [ekonomi](#), [adat](#) dan [budaya](#) yang memungkinkan adanya praktik [kebebasan politik](#) secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari adanya fungsi dan peran dewan perwakilan, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah. DPD sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan sistem pemerintahan otoritarian-oligarkhis-sentralistik yang dilaksanakan oleh rezim orde baru. Oleh sebab itu secara sistemik keberadaan Dewan Perwakilan Daerah ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari perjalanan panjang yang terjadi dalam perdebatan Perubahan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis-desentralistik sebagai tuntutan utama gerakan reformasi 1998.

Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya faktor demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dimasukkan untuk menerapkan prinsip checks and balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia.

Kata Kunci : *Dewan Perwakilan Daerah, Perjalanan Demokrasi, Ketatanegaraan.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN INDONESIA'S CONSTITUTIONAL SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH NAME: ABDUL RAHMAN HARIS SRN : 1911150013

Democracy is a form of government where important decisions are made, either directly or indirectly, based on the majority agreement freely given by the people. Democracy is a form of government in which all citizens have the same right to make decisions that can change their lives. Democracy allows citizens to participate - either directly or through representatives - in the formulation, development and making of laws.

Democracy includes social, economic, customary and cultural conditions that allow for the free and equal practice of political freedom. Democracy is also a set of ideas and principles about freedom and its practices and procedures. Democracy implies respect for human dignity. The journey of democracy in Indonesia cannot be separated from the function and role of the representative council, one of which is the Regional Representative Council. The DPD as a high state institution is essentially a response to the rejection of the authoritarian-oligarchic-centralistic government system implemented by the New Order regime. Therefore, systemically, the existence of the Regional Representatives Council cannot be separated from the long journey that occurred in the debate on Amendments to the 1945 Constitution in order to realize a democratic-decentralistic government system as the main demand of the 1998 reform movement.

The Regional Representatives Council through amendments to the State Constitution The background of the Republic of Indonesia in 1945 was the existence of democratization factors and efforts to accommodate the regions in making national policies. Theoretically, the existence of the Regional Representative Council was meant to apply the principle of checks and balances between state institutions, namely the existence of a process of mutual supervision and balancing between state institutions. This is done to strengthen central and regional relations in order to maintain the integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Regional Representative Council, Democracy Journey, State Administration

MOTTO

“Barang siapa menuntut ilmu, maka allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siap saja ada disisinya, barang siapa berlambat-lambat dalam amalnya niscaya tidak akan bias dipercepat oleh nasabnya.”

(H.R Muslim dalam shahih-nya)

Berlarilah tanpa berbalik arah untuk bisa sampai diatas puncak, karena dipuncak itulah engkau bisa melihat hasil jerih payah yang sudah engkau perjuangakan.

(Abdul Rahman Haris)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sujud syukur, ku persembahkan kepada Allah SWT berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, setitik harapan telah kugapai, kebahagiaan besar telah aku dapatkan. Rasa kebahagiaan dan keberhasilan yang aku rasakan saat ini takkan terwujud tanpa dukungan dari orang-orang terkasih, untuk itu dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih dan sayang kupersembahkan karya sederhana ini untuk kalian :

- ❖ Ayah dan Ibu, Parjiono SM dan Rumaniah terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- ❖ Saudara-saudaraku Yeni Gustina, S. Pd. Kakak Tertuaku, Rizki Wulandari, S. Pd. Kakak Keduaku, dan Endah Lestari, S. Ak. Kakak ketigaku. Terimakasih sudah memberiku semangat dan motivasi yang tiada henti, teguran keras jika aku berbuat salah. Karena kalian lah yang memotivasiku untuk menjadi lebih baik, lebih giat dalam menggapai cita-citaku.
- ❖ Untuk kakak ipar Elpa, Hendro Kasino dan Hakiki Sanakri terimakasih atas dukungan untuk segerah menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk sepupu-sepupuku, abang Andri, abang Yogi, Deki, Yefron, Engga, Fahmi.
- ❖ Terimakasih untuk Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. Suwarjin, M.A., Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ifansyah Putra, M. Sos.

- ❖ Terimakasih untuk dosen dosenku, terutama bapak Dr. Fauzan, S. Ag, MH dan bapak Hidayat Darussalam, M. E. Sy. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.
- ❖ Terimakasih untuk dosen Pembimbing Akademik (PA) bapak Wery Gusmansyah, MH
- ❖ Untuk semua keluarga besar Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A
- ❖ Untuk rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2019
- ❖ Almameterku.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYA”**, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksilainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2025

M...sangkutan



Abdul Rahman Haris

NIM 1911150013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN DAERAH PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** Sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

2. Terimakasih untuk Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. Suwarjin, M.A., Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ifansyah Putra, M. Sos.
3. Terimakasih untuk dosen dosenku, terutama bapak Dr. Fauzan, S. Ag, MH dan bapak Hidayat Darussalam, M. E. Sy. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.
4. Terimakasih untuk dosen Pembimbing Akademik (PA) bapak Wery Gusmansyah, MH.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu.....	5
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	11
B. Teori Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	17
C. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.....	17
D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	22
E. Perspektif Siyasah Dusturiyah	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	35
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	